

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Apabila pembangunan daerahnya baik, maka bisa dikatakan bahwa kinerja keuangan dalam pemerintah daerahnya pun baik, karena pembangunan daerah merupakan *output* dari kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan undang-undang (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Otonomi daerah mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah (Sari, 2016). Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk menjalankan wacana tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, karena melalui otonomi daerah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan

efisien (Sumarjo, 2010). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tidak seperti yang diharapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan daerah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai macam peraturan keuangan yang diterbitkan ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan hasil kinerja keuangan (Sari, 2016). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mulai dari adanya berbagai penyimpangan sampai pengungkapan yang tidak jelas dalam hal pengelolaan keuangan (Kusumawardani, 2012) dalam (Sari, 2016). Ada 2 temuan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2014 yakni, terkait Sistem Pengendalian Intern. Serta Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (news.detik, 2015)

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti dalam UU No.32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan wewenangya tersebut, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Sari (2016) meneliti Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Pulau Sumatra). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan *Leverage* dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan telah diteliti secara empiris oleh Mulyani (2017) di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Variabel *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh telah diteliti oleh Andirfa dkk (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Penelitian ini mengukur Pengaruh ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), *leverage*, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kinerja keuangan daerah dipilih karena menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Selain itu, kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Sari, 2016).

Selain itu, pengukuran diperlukan karena masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antarane.ws.com, 30 April 2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan ini perlu untuk dilakukan. Pernyataan ini didukung oleh Halachmi (2005, 510) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan suatu pengukuran kinerja.

**B. Rumusan Masalah.**

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017?

**C. Tujuan dan Manfaat**

## Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017
2. Menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017



3. Menguji dan menganalisis Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017
4. Menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017
5. Menguji dan menganalisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017

#### Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi, khususnya bidang akuntansi sektor publik. Dan diharapkan juga dapat menambah serta memperdalam wawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah/kota mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

b. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut di bidang akuntansi, khususnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah,